PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM SEKTOR TEKNOLOGI FINANSIAL (*FINTECH*)

A. A. Sagung Istri Chintya Ananda Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: sagungchintya19@gmail.com
Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i05.p1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum investasi dalam sektor teknologi finansial (fintech) di Indonesia dan upaya pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dan konsumen. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai peraturan yang ada, termasuk Peraturan OJK dan Rancangan Undang-Undang Fintech yang sedang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat langkah-langkah signifikan seperti penerapan regulatory sandbox dan peningkatan literasi keuangan, tantangan seperti keberadaan fintech ilegal dan perlindungan data pribadi masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan perkembangan fintech dapat memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: Investasi, Fintech, OJK, Pengaturan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework for investment in the financial technology (fintech) sector in Indonesia and the efforts of the government and the Financial Services Authority (OJK) to optimize regulations to provide legal protection for investors and consumers. Using a normative legal approach, this research explores existing regulations, including OJK regulations and the draft Fintech Law currently under discussion. The findings indicate that despite significant steps such as the implementation of a regulatory sandbox and increased financial literacy, challenges such as the presence of illegal fintech operations and personal data protection still need to be addressed. This study recommends the need for more comprehensive regulations and collaboration among stakeholders to create a safe and inclusive fintech ecosystem. Thus, it is expected that the development of fintech can have a positive impact on financial inclusion in Indonesia.

Keywords: Investment, Fintech, OJK, Legal Regulation.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dengan pesat beberapa tahun terakhir ini. *Fintech* menawarkan berbagai layanan keuangan yang inovatif dan efisien, seperti pembayaran digital, pinjaman online, crowdfunding, dan investasi. Dengan hadirnya *fintech* telah mengubah lanskap industri dalam bidang jasa keuangan di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan. Namun, dibalik pertumbuhan *fintech* yang cepat juga menimbulkan beberapa tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, khususnya terkait praktik pinjaman online (*pinjol*) ilegal yang sering kali membebankan bunga sangat tinggi.¹ Beberapa kasus telah terjadi di mana konsumen

¹ Jagtiani, J, 2018, "The Roles of Alternative Data and Machine Learning in Fintech Lending : Evidence from The Lending Club Consumer Platform".

menjadi korban dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang sering membebankan bunga berkali-lipat dari jumlah pinjaman. Selain itu, adanya praktik shadow banking dalam industri fintech juga dapat menimbulkan risiko dalam sistem keuangan.² Tantangan lainnya mencakup keamanan data dan privasi pengguna, resiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta persaingan dengan lembaga keuangan tradisional.³

Pertumbuhan pesat *fintech* didasari oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan penetrasi internet dan ponsel pintar, kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih inklusif dan efisien, dukungan pemerintah untuk digitalisasi ekonomi, serta minat investor dalam mendanai startup fintech yang inovatif. Namun, pesatnya perkembangan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam aspek regulasi dan perlindungan konsumen. Beberapa isu yang muncul antara lain risiko keamanan data dan privasi pengguna, potensi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlindungan investor dari penipuan atau kegagalan platform, serta persaingan dengan lembaga keuangan tradisional. Saat ini, kegiatan usaha fintech di Indonesia masih mengacu pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun, regulasi ini hanya mengatur hal teknis di dunia industri sehingga kekuatan hukumnya kurang memadai.⁴

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Jagtiani (2018), menekankan pentingnya regulasi khusus *fintech* untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas keuangan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Penelitian local, seperti karya Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe (2019), juga menyoroti peran penting fintech dalam mendukung UMKM melalui efisiensi layanan keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih memadai dan kuat dalam bentuk undang-undang untuk mengatur dan mengawasi industri *fintech* di Indonesia secara menyeluruh. Undang-undang *fintech* diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi industri *fintech*, memitigasi berbagai potensi risiko, menjaga kestabilan keuangan, memperkuat perlindungan konsumen, dan mendorong perkembangan dalam ekonomi digital.⁵ Pengaturan hukum investasi dalam sektor fintech menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, melindungi kepentingan konsumen dan investor, mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, regulasi yang tepat dapat mendorong kompetisi yang sehat antara fintech dan lembaga keuangan tradisional, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen melalui peningkatan kualitas layanan dan inovasi.⁶

Tantangan lain dalam pengaturan hukum fintech adalah sifat lintas batas dari teknologi digital. Transaksi fintech seringkali melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi, sehingga diperlukan koordinasi dan harmonisasi regulasi di tingkat

² Anastasia, Diva Salasa, (2023), "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(2), 136-151.

³ Dalimunthe, M. I. F, 2019, "Implementasi Fintech Terhadap UMKM di Kota Medan dengan Analisis SWOT", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan.

⁴ Irawansah, Didik, (2019), "Urgensi Pembentukan UU Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemi Covid-19", *SASI* 10, 10-20.

⁵ Fratiwi, Alfi, (2021), "Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia." *Media Of Law And Sharia*, 2(4), 368-382.

⁶ Sudirman, Lu, (2022), "Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471-493.

internasional. Hal ini menjadi semakin penting mengingat potensi fintech dalam mendorong inklusi keuangan global dan memfasilitasi transaksi lintas negara. Dengan latar belakang ini, penelitian tentang pengaturan hukum investasi dalam sektor fintech menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kerangka hukum yang ideal untuk mengatur perkembangan fintech di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di masa depan. Studi semacam ini juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem fintech, termasuk startup, investor, konsumen, dan regulator. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan strategi nasional untuk mengoptimalkan potensi fintech dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat daya saing Indonesia di era ekonomi digital global. Dengan demikian, pengaturan hukum yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, melainkan juga sebagai katalis untuk inovasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Jagtiani (2018) dan Magnuson (2018) menyatakan bahwa adanya regulasi atau undang-undang khusus fintech penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan menjaga kestabilan keuangan. Penelitian lain yang relevan adalah skripsi Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe (2019) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul "Implementasi Fintech Terhadap UMKM Di Kota Medan Dengan Analisis SWOT". Penelitian ini melakukan analisis bagaimana peran fintech dalam lembaga perbankan, khususnya tujuan perbankan dalam menerapkan fintech untuk meningkatkan efisiensi pelayanan nasabah.⁸ Hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan undang-undang khusus untuk mengatur industri fintech di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Regulasi atau undang-undang khusus fintech diharapkan dapat memberi landasan hukum yang kuat dan dapat memberikan jaminan dalam kepastian hukum, serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan di industri *fintech*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat ditarik dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum investasi dalam sektor teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana upaya pemerintah dan otoritas terkait dalam mengoptimalkan pengaturan investasi di sektor *fintech* guna memberikan perlindungan hukum bagi investor dan konsumen?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami kerangka hukum yang mengatur investasi dalam sektor *fintech* di Indonesia saat ini serta menilai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan OJK dalam mengoptimalkan pengaturan investasi di sektor *fintech*. Beberapa penelitian sebelumnya telah menekankan bagaimana pentingnya pembentukan regulasi atau undang-undang khusus guna mengatur industri fintech di Indonesia.

⁷ Dalimunthe, M. I. F., 2019, *Peran Fintech dalam Mendukung UMKM di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (102).

⁸ Mualim, Imam, 2020, *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perseketif Hukum Ekonomi Syariah*, Lampung Tengah.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor *fintech* di Indonesia. Metode ini akan melibatkan studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan pengaturan investasi dalam *fintech*.⁹ Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan dua pendekatan ini untuk meneliti dan memahami regulasi yang ada, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik kemudian menganalisis konsep-konsep dasar yang terkait dengan investasi dan perlindungan hukum dalam sektor *fintech*.¹⁰ Penelitian ini akan berfokus pada hukum investasi, termasuk peraturan-peraturan yang mengatur investasi di sektor *fintech*. Hukum administrasi negara penting untuk memahami bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, seperti OJK, mengatur dan mengawasi industri *fintech*, serta bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi perkembangan sektor ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Investasi dalam Sektor Teknologi Finansial (*Fintech*) di Indonesia

Penelitian mengenai pengaturan hukum investasi dalam sektor *fintech* di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum di sektor ini telah berkembang, industri *fintech* masih menghadapi tantangan besar. *Fintech* yang merupakan gabungan dari teknologi dan layanan keuangan, berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan banyak startup *fintech* yang mulai muncul dan menawarkan berbagai layanan. Sektor ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, namun juga menghadirkan tantangan dalam hal pengaturan dan perlindungan hukum bagi investor, konsumen, dan pihak terkait lainnya.¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia, telah mengeluarkan beberapa peraturan penting untuk mengatur industri *fintech*, antara lain Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital yang menjadi langkah awal dalam mengarahkan pertumbuhan sektor *fintech* di Indonesia. Regulasi ini memiliki tujuan guna memberikan panduan hukum yang jelas dan membantu memastikan bahwa layanan *fintech* beroperasi dalam batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, regulasi ini ditujukan untuk melindungi konsumen dan investor dari risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan layanan berbasis teknologi yang belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak.¹²

⁹ Aswira, (2024), "Perkembangan dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur", *Jurnal Ilmiah Bisnis & Kewirausahaan* 13(2), 180-186.

¹⁰ Sudirman, Lu, (2022), "Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum", *Jurnal Perkembangan Hukum Indonesia*, 4(3), 471-493.

¹¹ Tan, W., & Lee, M, (2019), "Fintech Regulation in Singapore : Navigating through the regulatory sandbox", *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 457-469.

¹² Suryadarma, Fatika Redita, (2024), "Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 4(1), 117-126.

Meskipun regulasi-regulasi ini telah membawa perubahan positif, masih ada kebutuhan akan peningkatan dan penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Pengaturan dengan Negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Singapura, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen. Meskipun keduanya memiliki regulasi yang berbeda, tantangan yang dihadapi dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen tetap ada. Penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi *fintech* di Indonesia perlu ditingkatkan agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Singapura dan Indonesia, meskipun berbeda dalam struktur regulasinya, menghadapi tantangan serupa, seperti kebutuhan untuk memastikan transparansi, melindungi data pribadi, dan menjaga stabilitas keuangan. Di Singapura misalnya, Monetary Authority of Singapore (MAS) telah mengembangkan kerangka kerja yang progresif untuk *fintech*, yang juga mencakup kolaborasi erat antara regulator, industri, dan akademisi untuk menciptakan inovasi yang aman.

Sementara itu, di Indonesia tantangan terbesar adalah memastikan regulasi yang cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan di industri. Penelitian menunjukkan bahwa peraturan *fintech* di Indonesia perlu terus ditingkatkan, terutama untuk merespons dinamika yang cepat dari teknologi finansial. Salah satu tantangan terbesar dalam pengaturan *fintech* di Indonesia yakni kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. *Fintech* adalah sektor yang relatif baru dan memerlukan keahlian khusus, termasuk pengetahuan mendalam tentang teknologi serta pemahaman terhadap resiko finansial. OJK dan regulator lainnya perlu memastikan bahwa staf mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai *fintech* agar mampu mengidentifikasi resiko dengan benar dan mengawasi industri dengan lebih efektif. Selain itu, masalah perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama dalam pengaturan *fintech*. Dengan semakin banyaknya data pengguna yang diakses oleh perusahaan *fintech*, isu keamanan dan privasi menjadi semakin kritis.¹³

OJK dan pemerintah perlu memastikan bahwa penyelenggara layanan *fintech* menerapkan standar keamanan data yang tinggi untuk melindungi data konsumen dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Regulasi yang ada saat ini sering kali dianggap tidak memadai untuk menghadapi perubahan cepat yang terjadi dalam industri keuangan digital. Seiring berkembangnya teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (*AI*), dan layanan berbasis data, tantangan yang dihadapi oleh regulator semakin kompleks. Kemunculan teknologi baru ini membawa banyak manfaat, tetapi juga meningkatkan resiko baru yang belum sepenuhnya diatur dalam regulasi saat ini. Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan regulasi khusus yang lebih komprehensif dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan di sektor *fintech* secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat urgensi untuk membentuk regulasi khusus yang dapat mengantisipasi berbagai resiko yang muncul dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen serta investor. Pendapat ini sejalan dengan pandangan banyak peneliti dan praktisi di bidang ini yang menekankan pentingnya regulasi khusus agar stabilitas keuangan dapat terjaga dan seluruh pihak yang terlibat dapat terlindungi secara hukum.¹⁴ Selain perlunya regulasi yang lebih komprehensif, kerjasama antara pemerintah, OJK, dan pelaku industri *fintech* juga sangat penting. Untuk menciptakan ekosistem *fintech* yang aman dan inovatif, diperlukan dialog terbuka antara semua pihak, sehingga regulasi dapat disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan industri sekaligus melindungi konsumen. Kolaborasi ini memungkinkan pihak regulator untuk memahami

¹³ Nugraha, A., 2021, *Regulasi Fintech di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Adaptasi Regulasi*, Jakarta: Rajawali Press, (120).

¹⁴ Kusumawati, R. & Anwar, F., 2021, *Pengaturan dan Perlindungan Konsumen dalam Industri Fintech*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana, (135).

kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh industri *fintech*, serta mendapatkan masukan berharga untuk menyusun regulasi yang lebih relevan. Kolaborasi ini juga dapat menjadi jembatan yang menghubungkan regulator dan innovator, memungkinkan inovasi teknologi berkembang dalam kerangka hukum yang disepakati. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi ini adalah penerapan “*Regulatory Sandbox*” oleh OJK.¹⁵

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial, pemerintah dan otoritas terkait harus terus berupaya meningkatkan kerangka hukum yang ada dan memastikan bahwa regulasi yang disusun mampu mengimbangi kecepatan perubahan teknologi. Dengan adanya dialog terbuka antara semua pihak, regulasi dapat disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan industri sekaligus melindungi konsumen. Meskipun terdapat tantangan, perkembangan *fintech* di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan. *Fintech* memungkinkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum bahkan tidak mendapat layanan oleh lembaga keuangan tradisional, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun undang-undang khusus mengenai *fintech* yang dapat mengatur secara komprehensif semua aspek terkait investasi, perlindungan konsumen, serta keamanan data pribadi. Selain itu, pelatihan bagi sumber daya manusia di sektor ini juga perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi regulasi yang lebih baik. Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum investasi dalam sektor *fintech* di Indonesia telah mengalami kemajuan, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan hukum bagi investor dan konsumen serta mendukung pertumbuhan industri *fintech* secara berkelanjutan.

3.2. Upaya Pemerintah dan Otoritas Terkait dalam Mengoptimalkan Pengaturan Investasi di Sektor *fintech* untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi Investor dan Konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah penting dalam mengoptimalkan penaturan investasi di sector *fintech* melalui pengenalan *regulatory sandbox*. *Regulatory sandbox* ini memungkinkan pelaku usaha *fintech* menguji produk dan layanan baru dalam lingkungan yang terkendali sebelum sepenuhnya memasuki pasar. Dalam ekosistem ini, regulator dapat memantau dan mengevaluasi dampak inovasi tersebut terhadap konsumen dan pasar secara keseluruhan. Dengan kata lain, *regulatory sandbox* berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara inovasi dan regulasi, memungkinkan perusahaan *fintech* untuk berkembang secara inovatif namun tetap berada di bawah pengawasan hukum yang jelas. Pengawasan ketat yang dilakukan dalam *regulatory sandbox* membantu memitigasi resiko-resiko yang mungkin timbul, seperti potensi penipuan, pelanggaran perlindungan data pribadi, atau dampak negatif lainnya pada konsumen. *Regulatory sandbox* memberi kesempatan bagi regulator untuk memahami produk baru sebelum produk tersebut secara penuh terjun di pasar, serta memberi ruang bagi *fintech* untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain *regulatory sandbox*, OJK dan pemerintah terus bekerja untuk membentuk regulasi khusus yang lebih komprehensif terkait *fintech*, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) *Fintech* yang sedang dalam tahap pembahasan. RUU ini diharapkan mampu menyediakan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen dan investor, serta mencakup berbagai aspek penting seperti perlindungan

¹⁵ Haryanto, J., 2022, *Fintech dan Regulasi: Menjembatani Inovasi dengan Keamanan*, Bandung: Refika Aditama, (112).

data pribadi, transparansi informasi, dan kewajiban penyelenggara dalam menjaga keamanan transaksi.¹⁶

Dalam era digital yang semakin kompleks, regulasi seperti RUU *Fintech* ini sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi finansial tidak berjalan tanpa batasan yang jelas dan tidak berpotensi merugikan konsumen. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu fokus utama dalam regulasi ini, mengingat banyaknya data sensitif yang diakses oleh layanan *fintech*. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai transparansi informasi dan keamanan transaksi, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menggunakan layanan *fintech*, serta lebih percaya terhadap industri keuangan digital secara keseluruhan. Selain upaya dari sisi regulasi, pemerintah juga fokus pada peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat, yang dianggap sebagai komponen penting dalam mendukung perkembangan *fintech*. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan digital, konsumen diharapkan mampu membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan layanan *fintech* dan terhindar dari resiko penipuan atau praktik tidak etis lainnya. Peningkatan literasi ini juga memungkinkan konsumen memahami hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan layanan *fintech*, serta lebih siap menghadapi berbagai resiko yang mungkin muncul. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, penyelenggara *fintech*, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan *fintech*. Kolaborasi ini bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan, baik dari regulator maupun industri, dapat terlibat dalam proses pengaturan yang lebih inklusif dan dapat berkontribusi pada perlindungan konsumen yang efektif.¹⁷

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan khusus untuk sektor *fintech* sangat penting, mengingat dinamika industri yang cepat berubah. Inovasi teknologi terus menghadirkan tantangan baru yang tidak selalu mudah diatasi dengan regulasi yang ada saat ini. Sebagai contoh, dengan kemunculan teknologi baru seperti *blockchain*, *artificial intelligence (AI)*, dan *big data*, serta meningkatnya kemungkinan terjadinya penipuan dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pembentukan RUU *Fintech* menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan regulasi *fintech*. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai hak-hak konsumen, diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian akibat praktik-praktik tidak etis dari penyelenggara layanan *fintech* yang mungkin mencoba memanfaatkan celah hukum atau kurangnya pemahaman konsumen terhadap layanan digital.¹⁸ Meskipun terdapat berbagai tantangan, perkembangan *fintech* di Indonesia sudah memberi dampak positif yang signifikan terhadap inklusi keuangan. Dengan adanya *fintech*, masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan tradisional kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan. Hal ini membantu memperluas inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi yang lebih luas. Sementara perkembangan ini cukup menggembirakan, perlindungan konsumen dan keamanan tetap menjadi prioritas yang harus dijaga. Dengan regulasi yang tepat, potensi *fintech*

¹⁶ Purwanto, Hadi, 2022, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis Kompleksitas*, 11(1), 80-91.

¹⁷ Surya, Y., 2021, *Peningkatan Literasi Keuangan di Era Digital*, Yogyakarta: Pustaka Universitas, (112).

¹⁸ Prasetyo, R., 2023, *Menghadapi Tantangan Regulasi dalam Teknologi Finansial* (Bandung: Alfabeta), (135).

dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan keamanan dan perlindungan konsumen. Potensi ini dapat tercapai jika pemerintah berhasil menerapkan regulasi yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap konsumen, menjaga stabilitas system keuangan, dan mendorong persaingan yang sehat di industri *fintech*. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah terus memperkuat kerangka hukum untuk sektor *fintech* dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan.¹⁹

Kolaborasi yang dilakukan antara regulator, penyelenggara *fintech*, dan masyarakat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi sekaligus memastikan bahwa resiko-resiko yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Selain itu, peningkatan program pendidikan keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan *fintech* dengan bijak. Literasi keuangan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk lebih waspada dalam menggunakan layanan keuangan digital dan lebih mampu mengenali resiko-resiko yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas terkait telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengoptimalkan pengaturan investasi di sektor *fintech*. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan perlindungan hukum bagi investor dan konsumen secara efektif. *Regulatory sandbox* yang diinisiasi OJK adalah langkah awal yang baik untuk menjembatani inovasi dan regulasi yang lebih komprehensif seperti RUU *Fintech*. Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik dan adaptif, potensi *fintech* dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercapai tanpa mengorbankan perlindungan konsumen.²⁰

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum investasi dalam sektor teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, seiring dengan pesatnya inovasi di industri ini. Regulasi awal, seperti Peraturan UJK No. 77/POJK.01/2016 dan No.13 77/POJK.02/2018, telah memberikan dasar hukum untuk mengatur operasional *fintech*, melindungi konsumen, dan memastikan transparansi. Namun, regulasi ini perlu ditingkatkan agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence (AI)*, dan analitik data. Tantangan utama yang dihadapi mencakup perlindungan data pribadi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta kebutuhan akan kerangka hukum yang fleksibel namun tegas. Salah satu langkah inovatif yang diambil OJK adalah penerapan *regulatory sandbox* untuk menguji layanan baru dalam lingkungan terkendali. Selain itu, kolaborasi antara regulator, pemerintah, dan pelaku industri menjadi kunci dalam menyusun regulasi yang relevan dan mendukung inovasi. Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan ekosistem *fintech* yang aman, menjaga stabilitas keuangan, dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pemerintah disarankan untuk menyusun undang-undang khusus *fintech* serta meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas sumber daya

¹⁹ ekon.go.id, 2020, *Pemerintah Dorong Fintech untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan dan Transformasi Digital*.

<https://ekon.go.id/>. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/634/pemerintah-dorong-fintech-untuk-tingkatkan-inklusi-keuangan-dan-transformasi-digital>.

²⁰ Setiawan, D., 2022, *Regulasi Keuangan Digital: Antara Inovasi dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Pustaka Setia, (142).

manusia. Dengan demikian, regulasi yang baik akan menjadi pondasi untuk mendukung pertumbuhan *fintech* secara berkelanjutan, melindungi konsumen, dan memaksimalkan dampak positif teknologi finansial di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Dalimunthe, M. I. F., 2019, *Peran Fintech dalam Mendukung UMKM di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, J., 2022, *Fintech dan Regulasi: Menjembatani Inovasi dengan Keamanan*, Bandung: Refika Aditama.
- Kusumawati, R. & Anwar, F., 2021, *Pengaturan dan Perlindungan Konsumen dalam Industri Fintech*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana.
- Nugraha, A., 2021, *Regulasi Fintech di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Adaptasi Regulasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Prasetyo, R., 2023, *Menghadapi Tantangan Regulasi dalam Teknologi Finansial*, Bandung: Alfabeta
- Setiawan, D., 2022, *Regulasi Keuangan Digital: Antara Inovasi dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Pustaka Setia.
- Surya, Y., 2022, *Peningkatan Literasi Keuangan di Era Digital*, Yogyakarta: Pustaka Universitas.

Jurnal

- Anastasia, Diva Salasa, (2023), "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(02), 136-151.
- Aswirah, (2024), "Perkembangan dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur", *Jurnal Ilmiah Bisnis & Kewirausahaan*, 13(2), 180-186.
- Dalimunthe, M. I. F. 2019. "Implementasi Fintech Terhadap UMKM di Kota Medan dengan Analisis SWOT". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan.
- Fратиwi, Alfi, (2021), "Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia", *Media Of Law And Sharia*, 2(4), 368-382.
- Irawansah, Didik, (2019), "Urgensi Pembentukan UU Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemi Covid-19", *SASI* 10, 10-20.
- Jagtiani, J, (2018), "The Roles of Alternative Data and Machine Learning in Fintech Lending : Evidence from The Lending Club Consumer Platform".
- Mualim, Imam, (2020), *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Persepektif Hukum Ekonomi Syariah*, Lampung Tengah.
- Purwanto, Hadi, (2022), "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis Kompleksitas*, 11(1), 80-91.
- Sudirman, Lu, (2022), "Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471-493.
- Suryadarma, Fatika Redita, (2024), "Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 4(1), 117-126.
- Tan, W., & Lee, M, (2019), "Fintech Regulation in Singapore : Navigating through the regulatory sandbox", *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 457-469.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

E-ISSN: 2303-0550.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Website

ekon.go.id. 2020. *Pemerintah Dorong Fintech untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan dan Transformasi Digital.* <https://ekon.go.id/>.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/634/pemerintah-dorong-fintech-untuk-tingkatkan-inklusi-keuangan-dan-transformasi-digital>